



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIM NURSALIM SALEH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 124259

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.476.692.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/324 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.694.192.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 732.500.000
3. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
4. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.320.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, BMW R 25 Tahun 1953, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, HONDA SEDAN CIVIC FERIO Tahun 1997, WARISAN Rp. 45.000.000
4. MOTOR, BMW SEPEDA MOTOR Tahun 1955, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOBIL, VOLKSWAGEN MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
7. MOTOR, BMW R27 Tahun 1966, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



8. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000
9. MOBIL, VW TIGUAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 4.324.737.557

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.287.558.841

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 13.558.988.398

III. HUTANG Rp. 397.048.331

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 13.161.940.067

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.